



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.07/2013

TENTANG

INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN
PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
6. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
7. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari APBD.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Kemampuan Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat KFD adalah kemampuan keuangan daerah dan dana transfer ke daerah, dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
10. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah adalah suatu indikator umum yang menggambarkan kaitan antara ruang fiskal (*fiscal space*) daerah terhadap persentase penduduk miskin di daerah.
11. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNPPK adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

L



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2014.

BAB III DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan dalam perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah meliputi data fiskal daerah dan data non fiskal daerah.
- (2) Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data kemampuan keuangan daerah, data anggaran transfer ke daerah, dan data belanja pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Data anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.
- (5) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain data jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
- (6) Persentase jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direpresentasikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 4

- (1) Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperoleh dari Peraturan Daerah mengenai APBD.
- (2) Data belanja pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari data perhitungan pengalokasian Dana Alokasi Umum.
- (3) Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diperoleh dari Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran transfer ke daerah.
- (4) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang digunakan adalah data tahun 2012.
- (2) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) yang digunakan adalah data tahun 2011.
- (3) Penggunaan periode data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketersediaan data.

BAB IV FORMULA PERHITUNGAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD).
- (2) IRFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan KFD riil per kapita dibagi dengan rata-rata KFD riil per kapita secara Nasional.

L



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (3) KFD riil per kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan KFD dibagi dengan jumlah penduduk dan IKK.
- (4) IPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan IKM terhadap rata-rata IKM secara Nasional.
- (5) Perhitungan IRFD dan/atau IPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata nasional untuk IRFD dan/atau IPPMD adalah 1;
 - b. Daerah yang mempunyai nilai IRFD dan/atau IPPMD sama dengan 1, dinyatakan sebagai daerah dengan IRFD dan/atau IPPMD sama dengan rata-rata nasional;
 - c. Daerah yang mempunyai nilai IRFD dan/atau IPPMD lebih dari 1, dinyatakan sebagai daerah dengan IRFD dan/atau IPPMD di atas rata-rata nasional; dan
 - d. Daerah yang mempunyai IRFD dan/atau IPPMD kurang dari 1, dinyatakan sebagai daerah dengan IRFD dan/atau IPPMD di bawah rata-rata nasional.

BAB V
PENENTUAN KELOMPOK DAERAH BERDASARKAN INDEKS
FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kaitan antara IRFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan IPPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digambarkan dalam bentuk peta kuadran.
- (2) Berdasarkan peta kuadran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kelompok daerah sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 adalah daerah dengan IRFD dan IPPMD di atas rata-rata nasional ($IRFD > 1$ dan $IPPMD > 1$);
 - b. Kelompok 2 adalah daerah dengan IRFD di bawah rata-rata nasional, namun IPPMD di atas rata-rata nasional ($IRFD < 1$, $IPPMD > 1$);

L



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- c. Kelompok 3 adalah daerah dengan IRFD dan IPPMD di bawah rata-rata nasional (IRFD < 1, IPPMD < 1); dan
- d. Kelompok 4 adalah daerah dengan IRFD di atas rata-rata nasional, namun IPPMD di bawah rata-rata nasional (IRFD > 1, IPPMD < 1).

Pasal 8

- (1) Kelompok daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kelompok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan TNPPK sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan daerah penyelenggara urusan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan alokasi DUB.

BAB VI PENENTUAN TINGKATAN BESARAN PENYEDIAAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA

Pasal 9

- (1) DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 1 menyediakan DDUB *sangat tinggi*;
 - b. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 2 menyediakan DDUB *sedang*;
 - c. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 3 menyediakan DDUB *rendah*; dan
 - d. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 4 menyediakan DDUB *tinggi*.
- (3) Penentuan besaran persentase DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh TNPPK sesuai dengan Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 571
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.07/2013
TENTANG
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM
RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA
PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR DAERAH BERDASARKAN
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam				
2	Kab. Aceh Barat	0,736	1,187	2	Sedang
3	Kab. Aceh Besar	0,525	0,620	3	Rendah
4	Kab. Aceh Selatan	0,733	0,886	3	Rendah
5	Kab. Aceh Singkil	1,049	1,126	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Aceh Tengah	0,882	0,896	3	Rendah
7	Kab. Aceh Tenggara	0,696	1,103	2	Sedang
8	Kab. Aceh Timur	0,548	1,087	2	Sedang
9	Kab. Aceh Utara	0,425	1,022	2	Sedang
10	Kab. Bireuen	0,489	0,906	3	Rendah
11	Kab. Aceh Pidie	0,449	0,552	3	Rendah
12	Kab. Simeulue	1,201	1,510	1	Sangat Tinggi
13	Kota Banda Aceh	1,079	0,322	4	Tinggi
14	Kota Sabang	3,189	0,504	4	Tinggi
15	Kota Langsa	0,775	0,452	3	Rendah
16	Kota Lhokseumawe	0,971	0,461	3	Rendah
17	Kab. Gayo Lues	1,649	1,352	1	Sangat Tinggi
18	Kab. Aceh Barat Daya	1,100	0,899	4	Tinggi
19	Kab. Aceh Jaya	1,660	0,928	4	Tinggi
20	Kab. Nagan Raya	0,865	1,142	2	Sedang
21	Kab. Aceh Tamiang	0,641	0,988	3	Rendah
22	Kab. Bener Meriah	1,154	1,110	1	Sangat Tinggi
23	Kab. Pidie Jaya	0,819	0,653	3	Rendah
24	Kota Subulussalam	1,525	1,514	1	Sangat Tinggi
25	Provinsi Sumatera Utara				
26	Kab. Asahan	0,283	0,606	3	Rendah
27	Kab. Dairi	0,556	0,979	3	Rendah
28	Kab. Deli Serdang	0,326	0,618	3	Rendah
29	Kab. Tanah Karo	0,575	0,691	3	Rendah
30	Kab. Labuhan Batu	0,422	1,065	2	Sedang
31	Kab. Langkat	0,381	0,696	3	Rendah
32	Kab. Mandailing Natal	0,431	1,428	2	Sedang
33	Kab. Nias	0,882	1,916	2	Sedang
34	Kab. Simalungun	0,483	0,701	3	Rendah
35	Kab. Tapanuli Selatan	0,704	1,166	2	Sedang
36	Kab. Tapanuli Tengah	0,558	1,185	2	Sedang
37	Kab. Tapanuli Utara	0,612	1,232	2	Sedang
38	Kab. Toba Samosir	1,069	0,875	4	Tinggi
39	Kota Binjai	0,723	0,423	3	Rendah
40	Kota Medan	0,661	0,365	3	Rendah
41	Kota Pematang Siantar	0,753	0,307	3	Rendah
42	Kota Sibolga	1,288	0,514	4	Tinggi
43	Kota Tanjung Balai	0,859	0,548	3	Rendah
44	Kota Tebing Tinggi	0,656	0,412	3	Rendah
45	Kota Padang Sidempuan	0,645	0,850	3	Rendah
46	Kab. Pakpak Bharat	2,145	1,494	1	Sangat Tinggi
47	Kab. Nias Selatan	0,401	1,618	2	Sedang
48	Kab. Humbang Hasundutan	0,842	1,181	2	Sedang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMDD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49	Kab. Serdang Berdagai	0,432	0,664	3	Rendah
50	Kab. Samosir	0,936	1,290	2	Sedang
51	Kab. Batu Bara	0,518	0,540	3	Rendah
52	Kab. Padang Lawas	0,748	1,202	2	Sedang
53	Kab. Padang Lawas Utara	0,926	1,552	2	Sedang
54	Kab. Labuhan Batu Selatan	0,375	0,777	3	Rendah
55	Kab. Labuhan Batu Utara	0,565	0,858	3	Rendah
56	Kab. Nias Utara	0,798	1,713	2	Sedang
57	Kab. Nias Barat	1,157	1,826	1	Sangat Tinggi
58	Kota Gunung Sitoli	0,851	1,361	2	Sedang
59	Provinsi Sumatera Barat				
60	Kab. Limapuluh Kota	0,558	0,743	3	Rendah
61	Kab. Agam	0,426	0,712	3	Rendah
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1,200	2,207	1	Sangat Tinggi
63	Kab. Padang Pariaman	0,525	0,790	3	Rendah
64	Kab. Pasaman	0,813	0,839	3	Rendah
65	Kab. Pesisir Selatan	0,505	0,701	3	Rendah
66	Kab. Sawahlunto Sijunjung	0,738	1,136	2	Sedang
67	Kab. Solok	0,595	0,910	3	Rendah
68	Kab. Tanah Datar	0,524	0,637	3	Rendah
69	Kota Bukit Tinggi	1,159	0,306	4	Tinggi
70	Kota Padang Panjang	2,749	0,310	4	Tinggi
71	Kota Padang	0,455	0,347	3	Rendah
72	Kota Payakumbuh	1,259	0,387	4	Tinggi
73	Kota Sawahlunto	2,980	0,447	4	Tinggi
74	Kota Solok	2,106	0,381	4	Tinggi
75	Kota Pariaman	1,691	0,405	4	Tinggi
76	Kab. Pasaman Barat	0,550	1,025	2	Sedang
77	Kab. Dharmasraya	0,870	0,799	3	Rendah
78	Kab. Solok Selatan	1,251	1,148	1	Sangat Tinggi
79	Provinsi Riau				
80	Kab. Bengkalis	1,798	1,241	1	Sangat Tinggi
81	Kab. Indragiri Hilir	0,583	1,691	2	Sedang
82	Kab. Indragiri Hulu	0,911	0,945	3	Rendah
83	Kab. Kampar	0,876	0,739	3	Rendah
84	Kab. Kuantan Singingi	1,200	0,920	4	Tinggi
85	Kab. Pelalawan	1,276	1,159	1	Sangat Tinggi
86	Kab. Rokan Hilir	0,928	1,374	2	Sedang
87	Kab. Rokan Hulu	0,746	0,860	3	Rendah
88	Kab. Siak	1,622	1,035	1	Sangat Tinggi
89	Kota Dumai	1,092	0,649	4	Tinggi
90	Kota Pekanbaru	0,536	0,331	3	Rendah
91	Kab. Kepulauan Meranti	1,586	1,790	1	Sangat Tinggi
92	Provinsi Jambi				
93	Kab. Batanghari	0,764	0,967	3	Rendah
94	Kab. Bungo	0,675	0,921	3	Rendah
95	Kab. Kerinci	0,664	0,608	3	Rendah
96	Kab. Merangin	0,630	1,247	2	Sedang
97	Kab. Muaro Jambi	0,486	0,951	3	Rendah
98	Kab. Sarolangun	1,092	1,090	1	Sangat Tinggi
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,698	1,623	2	Sedang
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,875	1,770	2	Sedang

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMDD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
101	Kab. Tebo	0,684	1,129	2	Sedang
102	Kota Jambi	0,445	0,386	3	Rendah
103	Kota Sungai Penuh	1,478	0,481	4	Tinggi
104	Provinsi Sumatera Selatan				
105	Kab. Lahat	0,915	1,095	2	Sedang
106	Kab. Musi Banyuasin	0,848	1,295	2	Sedang
107	Kab. Musi Rawas	0,724	1,118	2	Sedang
108	Kab. Muara Enim	0,583	1,287	2	Sedang
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0,515	1,414	2	Sedang
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0,801	0,821	3	Rendah
111	Kota Palembang	0,417	0,279	3	Rendah
112	Kota Prabumulih	0,973	0,689	3	Rendah
113	Kota Pagar Alam	1,000	0,477	3	Rendah
114	Kota Lubuk Linggau	0,939	0,531	3	Rendah
115	Kab. Banyuasin	0,372	1,362	2	Sedang
116	Kab. Ogan Ilir	0,529	1,241	2	Sedang
117	Kab. OKU Timur	0,412	0,898	3	Rendah
118	Kab. OKU Selatan	0,594	1,417	2	Sedang
119	Kab. Empat Lawang	0,876	1,284	2	Sedang
120	Provinsi Bengkulu				
121	Kab. Bengkulu Selatan	0,905	1,040	2	Sedang
122	Kab. Bengkulu Utara	0,651	1,291	2	Sedang
123	Kab. Rejang Lebong	0,655	1,376	2	Sedang
124	Kota Bengkulu	0,520	0,355	3	Rendah
125	Kab. Kaur	1,166	1,256	1	Sangat Tinggi
126	Kab. Seluma	0,687	1,444	2	Sedang
127	Kab. Mukomuko	0,745	1,392	2	Sedang
128	Kab. Lebong	1,194	1,054	1	Sangat Tinggi
129	Kab. Kepahiang	1,007	1,038	1	Sangat Tinggi
130	Kab. Bengkulu Tengah	1,076	1,316	1	Sangat Tinggi
131	Provinsi Lampung				
132	Kab. Lampung Barat	0,440	1,184	2	Sedang
133	Kab. Lampung Selatan	0,312	0,667	3	Rendah
134	Kab. Lampung Tengah	0,297	0,972	3	Rendah
135	Kab. Lampung Utara	0,356	1,384	2	Sedang
136	Kab. Lampung Timur	0,349	0,841	3	Rendah
137	Kab. Tanggamus	0,431	0,857	3	Rendah
138	Kab. Tulang Bawang	0,451	0,953	3	Rendah
139	Kab. Way Kanan	0,472	1,249	2	Sedang
140	Kota Bandar Lampung	0,495	0,293	3	Rendah
141	Kota Metro	1,054	0,514	4	Tinggi
142	Kab. Pesawaran	0,457	0,701	3	Rendah
143	Kab. Pringsewu	0,601	0,686	3	Rendah
144	Kab. Mesuji	0,478	0,958	3	Rendah
145	Kab. Tulang Bawang Barat	0,654	1,147	2	Sedang
146	Provinsi DKI Jakarta				
147	Provinsi Jawa Barat				
148	Kab. Bandung	0,224	0,447	3	Rendah
149	Kab. Bekasi	0,299	0,444	3	Rendah
150	Kab. Bogor	0,194	0,635	3	Rendah
151	Kab. Ciamis	0,249	0,600	3	Rendah
152	Kab. Cianjur	0,252	0,866	3	Rendah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
153	Kab. Cirebon	0,298	0,626	3	Rendah
154	Kab. Garut	0,309	0,837	3	Rendah
155	Kab. Indramayu	0,381	0,692	3	Rendah
156	Kab. Karawang	0,307	0,509	3	Rendah
157	Kab. Kuningan	0,365	0,481	3	Rendah
158	Kab. Majalengka	0,377	0,680	3	Rendah
159	Kab. Purwakarta	0,417	0,964	3	Rendah
160	Kab. Subang	0,342	0,521	3	Rendah
161	Kab. Sukabumi	0,253	0,851	3	Rendah
162	Kab. Sumedang	0,288	0,526	3	Rendah
163	Kab. Tasikmalaya	0,237	0,903	3	Rendah
164	Kota Bandung	0,576	0,335	3	Rendah
165	Kota Bekasi	0,362	0,344	3	Rendah
166	Kota Bogor	0,428	0,391	3	Rendah
167	Kota Cirebon	1,058	0,422	4	Tinggi
168	Kota Depok	0,260	0,270	3	Rendah
169	Kota Sukabumi	0,763	0,337	3	Rendah
170	Kota Tasikmalaya	0,604	0,369	3	Rendah
171	Kota Cimahi	0,468	0,355	3	Rendah
172	Kota Banjar	0,792	0,578	3	Rendah
173	Kab. Bandung Barat	0,237	0,587	3	Rendah
174	Provinsi Jawa Tengah				
175	Kab. Banjarnegara	0,468	0,634	3	Rendah
176	Kab. Banyumas	0,366	0,557	3	Rendah
177	Kab. Batang	0,411	0,656	3	Rendah
178	Kab. Blora	0,413	0,825	3	Rendah
179	Kab. Boyolali	0,443	0,753	3	Rendah
180	Kab. Brebes	0,280	0,773	3	Rendah
181	Kab. Cilacap	0,365	0,554	3	Rendah
182	Kab. Demak	0,351	0,570	3	Rendah
183	Kab. Grobogan	0,285	0,949	3	Rendah
184	Kab. Jepara	0,314	0,745	3	Rendah
185	Kab. Karanganyar	0,463	0,556	3	Rendah
186	Kab. Kebumen	0,312	0,621	3	Rendah
187	Kab. Kendal	0,430	0,546	3	Rendah
188	Kab. Klaten	0,424	0,541	3	Rendah
189	Kab. Kudus	0,455	0,476	3	Rendah
190	Kab. Magelang	0,352	0,637	3	Rendah
191	Kab. Pati	0,342	0,602	3	Rendah
192	Kab. Pekalongan	0,357	0,610	3	Rendah
193	Kab. Pemasang	0,307	0,761	3	Rendah
194	Kab. Purbalingga	0,407	0,477	3	Rendah
195	Kab. Purworejo	0,497	0,566	3	Rendah
196	Kab. Rembang	0,550	0,521	3	Rendah
197	Kab. Semarang	0,387	0,441	3	Rendah
198	Kab. Sragen	0,447	0,684	3	Rendah
199	Kab. Sukoharjo	0,475	0,466	3	Rendah
200	Kab. Tegal	0,316	0,621	3	Rendah
201	Kab. Temanggung	0,428	0,482	3	Rendah
202	Kab. Wonogiri	0,483	0,710	3	Rendah
203	Kab. Wonosobo	0,386	0,677	3	Rendah
204	Kota Magelang	1,589	0,310	4	Tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMDD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
205	Kota Pekalongan	0,716	0,391	3	Rendah
206	Kota Salatiga	1,084	0,309	4	Tinggi
207	Kota Semarang	0,570	0,313	3	Rendah
208	Kota Surakarta	0,760	0,318	3	Rendah
209	Kota Tegal	0,934	0,459	3	Rendah
210	Provinsi DI-Yogyakarta				
211	Kab. Bantul	0,450	0,417	3	Rendah
212	Kab. Gunung Kidul	0,451	0,878	3	Rendah
213	Kab. Kulon Progo	0,694	0,500	3	Rendah
214	Kab. Sleman	0,491	0,359	3	Rendah
215	Kota Yogyakarta	0,907	0,259	3	Rendah
216	Provinsi Jawa Timur				
217	Kab. Bangkalan	0,375	0,976	3	Rendah
218	Kab. Banyuwangi	0,393	0,653	3	Rendah
219	Kab. Blitar	0,420	0,471	3	Rendah
220	Kab. Bojonegoro	0,435	0,715	3	Rendah
221	Kab. Bondowoso	0,440	0,989	3	Rendah
222	Kab. Gresik	0,437	0,448	3	Rendah
223	Kab. Jember	0,363	0,918	3	Rendah
224	Kab. Jombang	0,291	0,449	3	Rendah
225	Kab. Kediri	0,292	0,426	3	Rendah
226	Kab. Lamongan	0,383	0,669	3	Rendah
227	Kab. Lumajang	0,388	0,712	3	Rendah
228	Kab. Madiun	0,444	0,558	3	Rendah
229	Kab. Magetan	0,508	0,455	3	Rendah
230	Kab. Malang	0,318	0,567	3	Rendah
231	Kab. Mojokerto	0,345	0,394	3	Rendah
232	Kab. Nganjuk	0,345	0,543	3	Rendah
233	Kab. Ngawi	0,378	0,680	3	Rendah
234	Kab. Pacitan	0,570	0,615	3	Rendah
235	Kab. Pamekasan	0,386	0,942	3	Rendah
236	Kab. Pasuruan	0,356	0,685	3	Rendah
237	Kab. Ponorogo	0,415	0,579	3	Rendah
238	Kab. Probolinggo	0,431	1,071	2	Sedang
239	Kab. Sampang	0,334	1,517	2	Sedang
240	Kab. Sidoarjo	0,383	0,333	3	Rendah
241	Kab. Situbondo	0,492	1,020	2	Sedang
242	Kab. Sumenep	0,367	1,047	2	Sedang
243	Kab. Trenggalek	0,503	0,700	3	Rendah
244	Kab. Tuban	0,418	0,708	3	Rendah
245	Kab. Tulungagung	0,393	0,358	3	Rendah
246	Kota Blitar	1,376	0,323	4	Tinggi
247	Kota Kediri	1,030	0,300	4	Tinggi
248	Kota Madiun	1,193	0,272	4	Tinggi
249	Kota Malang	0,613	0,329	3	Rendah
250	Kota Mojokerto	1,386	0,286	4	Tinggi
251	Kota Pasuruan	0,963	0,495	3	Rendah
252	Kota Probolinggo	1,001	0,420	4	Tinggi
253	Kota Surabaya	0,724	0,302	3	Rendah
254	Kota Batu	0,843	0,361	3	Rendah
255	Provinsi Kalimantan Barat				
256	Kab. Bengkayang	0,675	1,710	2	Sedang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMDD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
257	Kab. Landak	0,548	1,791	2	Sedang
258	Kab. Kapuas Hulu	0,875	1,927	2	Sedang
259	Kab. Ketapang	0,505	1,574	2	Sedang
260	Kab. Pontianak	0,524	1,591	2	Sedang
261	Kab. Sambas	0,418	1,895	2	Sedang
262	Kab. Sanggau	0,463	1,679	2	Sedang
263	Kab. Sintang	0,503	1,922	2	Sedang
264	Kota Pontianak	0,483	1,406	2	Sedang
265	Kota Singkawang	0,651	1,123	2	Sedang
266	Kab. Sekadau	0,694	1,757	2	Sedang
267	Kab. Melawi	0,676	2,092	2	Sedang
268	Kab. Kayong Utara	1,356	1,559	1	Sangat Tinggi
269	Kab. Kubu Raya	0,335	1,841	2	Sedang
270	Provinsi Kalimantan Tengah				
271	Kab. Barito Selatan	1,346	1,339	1	Sangat Tinggi
272	Kab. Barito Utara	1,223	1,197	1	Sangat Tinggi
273	Kab. Kapuas	0,681	1,779	2	Sedang
274	Kab. Kotawaringin Barat	0,735	0,768	3	Rendah
275	Kab. Kotawaringin Timur	0,625	1,456	2	Sedang
276	Kota Palangkaraya	0,698	0,657	3	Rendah
277	Kab. Katingan	1,356	1,494	1	Sangat Tinggi
278	Kab. Seruyan	1,321	1,905	1	Sangat Tinggi
279	Kab. Sukamara	2,310	1,027	1	Sangat Tinggi
280	Kab. Lamandau	2,378	1,434	1	Sangat Tinggi
281	Kab. Gunung Mas	1,324	1,971	1	Sangat Tinggi
282	Kab. Pulang Pisau	1,158	1,814	1	Sangat Tinggi
283	Kab. Murung Raya	2,728	2,111	1	Sangat Tinggi
284	Kab. Barito Timur	1,403	1,294	1	Sangat Tinggi
285	Provinsi Kalimantan Selatan				
286	Kab. Banjar	0,641	1,468	2	Sedang
287	Kab. Barito Kuala	0,613	1,512	2	Sedang
288	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,871	0,987	3	Rendah
289	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,716	0,922	3	Rendah
290	Kab. Hulu Sungai Utara	0,881	1,101	2	Sedang
291	Kab. Kota Baru	1,179	1,333	1	Sangat Tinggi
292	Kab. Tabalong	1,264	1,125	1	Sangat Tinggi
293	Kab. Tanah Laut	0,919	1,136	2	Sedang
294	Kab. Tapin	1,442	1,034	1	Sangat Tinggi
295	Kota Banjar Baru	0,802	0,565	3	Rendah
296	Kota Banjarmasin	0,524	0,568	3	Rendah
297	Kab. Balangan	1,894	1,396	1	Sangat Tinggi
298	Kab. Tanah Bumbu	1,241	1,278	1	Sangat Tinggi
299	Provinsi Kalimantan Timur				
300	Kab. Berau	3,059	0,830	4	Tinggi
301	Kab. Bulungan	3,965	1,418	1	Sangat Tinggi
302	Kab. Kutai Kartanegara	2,535	1,025	1	Sangat Tinggi
303	Kab. Kutai Barat	3,613	1,368	1	Sangat Tinggi
304	Kab. Kutai Timur	3,995	1,179	1	Sangat Tinggi
305	Kab. Malinau	7,143	1,628	1	Sangat Tinggi
306	Kab. Nunukan	3,705	1,734	1	Sangat Tinggi
307	Kab. Pasir	2,250	1,428	1	Sangat Tinggi
308	Kota Balikpapan	1,059	0,290	4	Tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
309	Kota Bontang	3,399	0,329	4	Tinggi
310	Kota Samarinda	0,959	0,398	3	Rendah
311	Kota Tarakan	2,356	0,761	4	Tinggi
312	Kab. Penajam Paser Utara	3,185	0,708	4	Tinggi
313	Kab. Tana Tidung	20,798	1,673	1	Sangat Tinggi
314	Provinsi Sulawesi Utara				
315	Kab. Bolaang Mongondow	0,499	0,841	3	Rendah
316	Kab. Minahasa	0,490	0,327	3	Rendah
317	Kab. Sangihe	0,785	0,816	3	Rendah
318	Kota Bitung	0,778	0,474	3	Rendah
319	Kota Manado	0,604	0,375	3	Rendah
320	Kab. Kepulauan Talaud	0,934	0,722	3	Rendah
321	Kab. Minahasa Selatan	0,601	0,583	3	Rendah
322	Kota Tomohon	1,010	0,286	4	Tinggi
323	Kab. Minahasa Utara	0,760	0,698	3	Rendah
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1,311	1,202	1	Sangat Tinggi
325	Kota Kotamobagu	0,810	0,299	3	Rendah
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,367	0,819	4	Tinggi
327	Kab. Minahasa Tenggara	0,975	0,539	3	Rendah
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,289	0,712	4	Tinggi
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,336	0,665	4	Tinggi
330	Provinsi Sulawesi Tengah				
331	Kab. Banggai	0,587	0,802	3	Rendah
332	Kab. Banggai Kepulauan	0,789	0,905	3	Rendah
333	Kab. Buol	1,105	0,875	4	Tinggi
334	Kab. Toli-Toli	0,764	0,879	3	Rendah
335	Kab. Donggala	0,711	1,041	2	Sedang
336	Kab. Morowali	0,976	1,287	2	Sedang
337	Kab. Poso	0,807	0,810	3	Rendah
338	Kota Palu	0,712	0,462	3	Rendah
339	Kab. Parigi Moutong	0,453	0,927	3	Rendah
340	Kab. Tojo Una Una	1,037	1,049	1	Sangat Tinggi
341	Kab. Sigi	0,756	1,192	2	Sedang
342	Provinsi Sulawesi Selatan				
343	Kab. Bantaeng	0,732	0,917	3	Rendah
344	Kab. Barru	0,874	0,592	3	Rendah
345	Kab. Bone	0,442	1,034	2	Sedang
346	Kab. Bulukumba	0,475	0,791	3	Rendah
347	Kab. Enrekang	0,826	1,058	2	Sedang
348	Kab. Gowa	0,385	1,013	2	Sedang
349	Kab. Jeneponto	0,444	1,018	2	Sedang
350	Kab. Luwu	0,502	0,970	3	Rendah
351	Kab. Luwu Utara	0,737	0,861	3	Rendah
352	Kab. Maros	0,631	1,076	2	Sedang
353	Kab. Pangkajene Kepulauan	0,611	0,943	3	Rendah
354	Kota Palopo	0,651	0,468	3	Rendah
355	Kab. Luwu Timur	0,907	0,664	3	Rendah
356	Kab. Pinrang	0,655	0,685	3	Rendah
357	Kab. Sinjai	0,734	0,778	3	Rendah
358	Kab. Selayar	0,640	0,601	3	Rendah
359	Kab. Sidenreng Rappang	0,713	0,621	3	Rendah
360	Kab. Soppeng	0,879	0,613	3	Rendah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
361	Kab. Takalar	0,597	0,949	3	Rendah
362	Kab. Tana Toraja	0,710	1,531	2	Sedang
363	Kab. Wajo	0,221	0,848	3	Rendah
364	Kota Pare-pare	1,443	0,368	4	Tinggi
365	Kota Makassar	0,644	0,429	3	Rendah
366	Kab. Toraja Utara	0,579	1,219	2	Sedang
367	Provinsi Sulawesi Tenggara				
368	Kab. Buton	0,565	0,932	3	Rendah
369	Kab. Konawe	0,700	0,969	3	Rendah
370	Kab. Kolaka	0,699	0,840	3	Rendah
371	Kab. Muna	0,548	0,924	3	Rendah
372	Kota Kendari	0,626	0,451	3	Rendah
373	Kota Bau-bau	0,902	0,505	3	Rendah
374	Kab. Konawe Selatan	0,593	1,459	2	Sedang
375	Kab. Bombana	0,853	1,175	2	Sedang
376	Kab. Wakatobi	1,077	1,072	1	Sangat Tinggi
377	Kab. Kolaka Utara	0,955	0,828	3	Rendah
378	Kab. Konawe Utara	2,666	1,250	1	Sangat Tinggi
379	Kab. Buton Utara	1,833	0,973	4	Tinggi
380	Provinsi Bali				
381	Kab. Badung	1,360	0,347	4	Tinggi
382	Kab. Bangli	0,706	0,813	3	Rendah
383	Kab. Buleleng	0,409	0,636	3	Rendah
384	Kab. Gianyar	0,614	0,548	3	Rendah
385	Kab. Jembrana	0,692	0,521	3	Rendah
386	Kab. Karangasem	0,618	1,169	2	Sedang
387	Kab. Klungkung	0,904	0,805	3	Rendah
388	Kab. Tabanan	0,599	0,436	3	Rendah
389	Kota Denpasar	0,491	0,227	3	Rendah
390	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
391	Kab. Bima	0,537	0,962	3	Rendah
392	Kab. Dompu	0,760	0,920	3	Rendah
393	Kab. Lombok Barat	0,408	1,136	2	Sedang
394	Kab. Lombok Tengah	0,342	1,217	2	Sedang
395	Kab. Lombok Timur	0,337	1,036	2	Sedang
396	Kab. Sumbawa	0,562	0,975	3	Rendah
397	Kota Mataram	0,527	0,511	3	Rendah
398	Kota Bima	0,885	0,764	3	Rendah
399	Kab. Sumbawa Barat	1,991	0,869	4	Tinggi
400	Kab. Lombok Utara	0,707	1,330	2	Sedang
401	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
402	Kab. Alor	0,607	1,318	2	Sedang
403	Kab. Belu	0,383	1,247	2	Sedang
404	Kab. Ende	0,631	0,829	3	Rendah
405	Kab. Flores Timur	0,548	0,794	3	Rendah
406	Kab. Kupang	0,586	1,396	2	Sedang
407	Kab. Lembata	0,842	1,074	2	Sedang
408	Kab. Manggarai	0,385	1,243	2	Sedang
409	Kab. Ngada	0,847	0,749	3	Rendah
410	Kab. Sikka	0,457	1,302	2	Sedang
411	Kab. Sumba Barat	1,119	1,438	1	Sangat Tinggi
412	Kab. Sumba Timur	0,712	1,336	2	Sedang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413	Kab. Timor Tengah Selatan	0,334	1,745	2	Sedang
414	Kab. Timor Tengah Utara	0,528	1,240	2	Sedang
415	Kota Kupang	0,411	0,408	3	Rendah
416	Kab. Rote Ndao	0,704	1,088	2	Sedang
417	Kab. Manggarai Barat	0,636	1,529	2	Sedang
418	Kab. Nagekeo	0,866	0,804	3	Rendah
419	Kab. Sumba Tengah	1,456	1,915	1	Sangat Tinggi
420	Kab. Sumba Barat Daya	0,523	2,156	2	Sedang
421	Kab. Manggarai Timur	0,495	1,223	2	Sedang
422	Kab. Sabu Raijua	0,918	1,485	2	Sedang
423	Provinsi Maluku				
424	Kab. Maluku Tenggara Barat	1,232	1,010	1	Sangat Tinggi
425	Kab. Maluku Tengah	0,445	0,794	3	Rendah
426	Kab. Maluku Tenggara	0,780	0,944	3	Rendah
427	Kab. Pulau Buru	1,189	1,617	1	Sangat Tinggi
428	Kota Ambon	0,625	0,296	3	Rendah
429	Kab. Seram Bagian Barat	0,746	0,934	3	Rendah
430	Kab. Seram Bagian Timur	1,248	1,123	1	Sangat Tinggi
431	Kab. Kepulauan Aru	1,589	1,781	1	Sangat Tinggi
432	Kota Tual	0,959	0,885	3	Rendah
433	Kab. Maluku Barat Daya	1,590	0,834	4	Tinggi
434	Kab. Buru Selatan	1,726	1,364	1	Sangat Tinggi
435	Provinsi Papua				
436	Kab. Biak Numfor	0,922	1,108	2	Sedang
437	Kab. Jayapura	1,328	1,086	1	Sangat Tinggi
438	Kab. Jayawijaya	0,336	2,256	2	Sedang
439	Kab. Merauke	0,781	1,306	2	Sedang
440	Kab. Mimika	1,345	1,425	1	Sangat Tinggi
441	Kab. Nabire	1,133	1,757	1	Sangat Tinggi
442	Kab. Paniai	0,557	1,981	2	Sedang
443	Kab. Puncak Jaya	0,555	2,008	2	Sedang
444	Kota Jayapura	0,477	0,536	3	Rendah
445	Kab. Deiyai	1,009	3,145	1	Sangat Tinggi
446	Kab. Sarmi	3,373	2,210	1	Sangat Tinggi
447	Kab. Keerom	2,364	1,418	1	Sangat Tinggi
448	Kab. Yahukimo	0,674	3,246	2	Sedang
449	Kab. Pegunungan Bintang	1,050	3,303	1	Sangat Tinggi
450	Kab. Tolikara	0,545	3,382	2	Sedang
451	Kab. Boven Digoel	2,780	2,925	1	Sangat Tinggi
452	Kab. Mappi	1,618	3,194	1	Sangat Tinggi
453	Kab. Asmat	1,702	3,420	1	Sangat Tinggi
454	Kab. Waropen	5,198	1,861	1	Sangat Tinggi
455	Kab. Supiori	5,012	1,708	1	Sangat Tinggi
456	Kab. Yapen Waropen	1,457	0,937	4	Tinggi
457	Kab. Puncak	0,579	3,089	2	Sedang
458	Kab. Yalimo	0,908	2,899	2	Sedang
459	Kab. Lanny Jaya	0,338	2,858	2	Sedang
460	Kab. Memberamo Raya	6,508	2,541	1	Sangat Tinggi
461	Kab. Nduga	0,682	3,034	2	Sedang
462	Kab. Dogiyai	0,929	2,836	2	Sedang
463	Kab. Memberamo Tengah	0,987	2,921	2	Sedang
464	Kab. Intan Jaya	1,168	3,220	1	Sangat Tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
465	Provinsi Maluku Utara				
466	Kab. Halmahera Tengah	2,003	0,771	4	Tinggi
467	Kota Ternate	0,667	0,482	3	Rendah
468	Kab. Halmahera Barat	0,917	1,248	2	Sedang
469	Kab. Halmahera Timur	1,590	1,408	1	Sangat Tinggi
470	Kab. Halmahera Selatan	0,967	1,964	2	Sedang
471	Kab. Halmahera Utara	0,859	1,178	2	Sedang
472	Kab. Kepulauan Sulá	0,988	1,096	2	Sedang
473	Kota Tidore Kepulauan	0,913	1,084	2	Sedang
474	Kab. Pulau Morotai	1,191	0,836	4	Tinggi
475	Provinsi Banten				
476	Kab. Lebak	0,324	1,175	2	Sedang
477	Kab. Pandeglang	0,278	1,183	2	Sedang
478	Kab. Serang	0,340	0,902	3	Rendah
479	Kab. Tangerang	0,284	0,540	3	Rendah
480	Kota Cilegon	0,901	0,501	3	Rendah
481	Kota Tangerang	0,379	0,409	3	Rendah
482	Kota Serang	0,384	0,914	3	Rendah
483	Kota Tangerang Selatan	0,386	0,477	3	Rendah
484	Provinsi Bangka Belitung				
485	Kab. Bangka	0,608	0,693	3	Rendah
486	Kab. Belitung	1,046	0,634	4	Tinggi
487	Kota Pangkal Pinang	0,818	0,303	3	Rendah
488	Kab. Bangka Selatan	0,863	0,919	3	Rendah
489	Kab. Bangka Tengah	0,797	0,756	3	Rendah
490	Kab. Bangka Barat	0,791	1,341	2	Sedang
491	Kab. Belitung Timur	1,258	0,630	4	Tinggi
492	Provinsi Gorontalo				
493	Kab. Boalemo	0,762	0,878	3	Rendah
494	Kab. Gorontalo	0,517	0,805	3	Rendah
495	Kota Gorontalo	0,811	0,497	3	Rendah
496	Kab. Pohuwato	0,888	0,942	3	Rendah
497	Kab. Bone Bolango	0,847	0,649	3	Rendah
498	Kab. Gorontalo Utara	0,903	1,115	2	Sedang
499	Provinsi Riau Kepulauan				
500	Kab. Natuna	3,828	0,971	4	Tinggi
501	Kab. Kepulauan Anambas	4,726	0,982	4	Tinggi
502	Kab. Karimun	1,281	0,748	4	Tinggi
503	Kota Batam	0,399	0,336	3	Rendah
504	Kota Tanjung Pinang	1,169	0,370	4	Tinggi
505	Kab. Lingga	2,262	0,992	4	Tinggi
506	Kab. Bintan	1,684	0,656	4	Tinggi
507	Provinsi Papua Barat				
508	Kab. Fak Fak	2,210	1,414	1	Sangat Tinggi
509	Kab. Manokwari	1,176	1,705	1	Sangat Tinggi
510	Kab. Sorong	2,759	2,129	1	Sangat Tinggi
511	Kota Sorong	0,856	0,593	3	Rendah
512	Kab. Raja Ampat	3,706	1,296	1	Sangat Tinggi
513	Kab. Sorong Selatan	3,015	1,924	1	Sangat Tinggi
514	Kab. Teluk Bintuni	3,182	1,834	1	Sangat Tinggi
515	Kab. Teluk Wondama	4,348	1,821	1	Sangat Tinggi
516	Kab. Kaimana	3,550	1,456	1	Sangat Tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Kabupaten/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
517	Kab. Tambrauw	15,486	1,323	1	Sangat Tinggi
518	Kab. Maybrat	2,233	1,760	1	Sangat Tinggi
519	Provinsi Sulawesi Barat				
520	Kab. Majene	0,741	0,657	3	Rendah
521	Kab. Mamuju	0,504	1,042	2	Sedang
522	Kab. Polewali Mandar	0,480	0,958	3	Rendah
523	Kab. Mamasa	0,649	1,945	2	Sedang
524	Kab. Mamuju Utara	0,807	1,133	2	Sedang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

f